

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Arif Budiyo, ST. MT

Sebagai Calon Bupati Klaten Tahun 2020

Memberikan kuasa kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pribadi / Pejabat Negara (LHKPN) hasil penelitian dan/atau klarifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada masyarakat.

Demikian surat kuasa ini kami sampaikan, untuk menjadi maklum.

Klaten,, *Oktober* 2020



(Dr. Arif Budiyo, ST, MT)

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 September 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
UNIT KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
SUB UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIF BUDIYONO**
2. Jabatan : **CALON BUPATI**
3. NHK : **752367**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 42.000.000.000**

1. Tanah Seluas 5746 m2 di BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000.000
2. Tanah Seluas 7500 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/500 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 14.000.000**

1. MOTOR, HONDA XIB02N04LO AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA XIB02N04LO AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 50.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 163.000.000****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---****Sub Total** **Rp. 42.227.000.000****III. HUTANG** **Rp. ---****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 42.227.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **24 September 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.